

ARTIKEL

ANALYSIS OF THE FATWA OF THE NATIONAL SHARIA COUNCIL OF THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL ON THE RAHN CONTRACT AT PT PEGADAIAN SYARIAH SIMPANG LIMA BANYUWANGI



Oleh:

Niswa Alfriza Aulia Yusnitha

NIM: 2113111060

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**



PRASYARAT GELAR

ANALYSIS OF THE FATWA OF THE NATIONAL SHARIA COUNCIL OF THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL ON THE RAHN CONTRACT AT PT PEGADAIAN SYARIAH SIMPANG LIMA BANYUWANGI

ARTIKEL

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Niswa Alfriza Aulia Yusnitha
NIM: 2113111006

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Artikel dengan judul:
**ANALYSIS OF THE FATWA OF THE NATIONAL SHARIA
COUNCIL OF THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL ON THE
RAHN CONTRACT AT PT PEGADAIAN SYARIAH SIMPANG LIMA
BANYUWANGI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Artikel
Pada tanggal: 09 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Prodi



Munawir, S.Ag., M.Ag
NIPY. 315031202701

Pembimbing

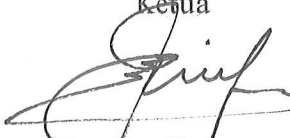


Imam Muslih, A.Md., S. E., M.E.
NIPY. 3152308129201

PENGESAHAN PENGUJI

Artikel saudara **Niswa Alfriza Aulia Yusritha** telah di Munaqosah
Kepada Dewan Penguji Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
pada tanggal: 09 Juli 2025
dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S.E)

Tim penguji:
Ketua


Drs. Eko Budiwono, M.H.
NIPY. 3150131076601

Penguji I


Drs. Edy Sujoko, M.H.
NIPY. 3150514096301

Penguji II


Imam Muslih, A.Md., S. E., M.E.
NIPY. 3152308129201

Dekan



Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.
NIPY. 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Ketika kamu merasa ingin berhenti dan menyerah, pikirkan tentang mengapa kamu memulainya dan seberapa jauh kamu melangkah"

Persembahan

Akhirnya tercapai juga sebuah perjalanan perjuangan yang penuh tantangan berhasil ku tempuh berawal dari suka dan duka, menunduk meski terbentur, mengelak mesti terjatuh, pahit dan getir nya yang kurasakan saat melangkah di celah-celah perjalanan studiku namun seakan hilang tanpa bekas di saat keberhasilan bersama ku. Artikel ini saya persembahkan untuk:

1. Diri sendiri yang selalu mampu menguatkan dan menyakinkan tanpa jeda bahwa semua nya bakalan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya, Bunda Sri Komariyah dan Ayah Agus Budiarto atas segala pengorbanan dan doa yang tidak pernah berhenti untuk anak nya, semoga Bunda dan Ayah selalu di berikan kesehatan dan kebahagiaan, terimakasih sudah selalu memberikan suport terbaik untuk anaknya.
3. Kakak Kandung saya Mas Arief, terimakasih selalu memberikan dorongan dan motifasi hingga bisa ke tahap ini, semoga selalu di berkahi dan diberikan kesehatan.
4. Kyai dan Bu Nyai, terimakasih atas doa dan ilmu yang di berikan beliau kepada saya, Semoga beliau di berikan kesehatan dan kebahagiaan.
5. Saudara saya Niko saputra, terimakasih telah membantu saya dan mensupport saya dalam hal kebaikan, Semoga selalu di berikan kebahagiaan.
6. Sahabat saya, Imroati Maksunah dan Nadya robitatul, terimakasih sudah setia menemani kegundahan maupun keceriaan hari-hari ku.
7. Teman-teman ku El darha, yang tidak bisa ku sebutkan namanya satu persatu, terimakasih selalu memberikan semangat untuk saya.

Saya ucapkan terimakasih yang tiada terhingga atas perjuangan untuk terus mendukung saya. Ucapan terimakasih ini tidak sebanding dengan apa yang telah tercurahkan untuk ku selama ini. namun, segala usaha akan ku rintis demi membahagiakan kalian, yang paling berarti di hidup ku. Semoga artikel ini bisa menjadi seuntai kebahagiaan yang ku persembahkan untuk kalian.

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Niswa Alfriza Aulia Yusnitha
NIM : 2113111060
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Alamat : jl. Raya kuta, Badung, Denpasar, Bali

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, ... 09 Juli 2025



Saya Yang Menyatakan,



Niswa Alfriza Aulia Yusnitha
NIM: 2113111060

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan artikel ini dengan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan Ikhlas kepada:

1. Pengasuh pondok pesantren Darussalam blokagung
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A selaku ketua senat Universitas KH. Mukhtar Syafaat Darussalam Blokagung Banyuwangi
3. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I selaku Rektor Universitas KH. Mukhtar Syafaat Darussalam Blokagung Banyuwangi
4. Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRA., CRP. Selaku dekan fakultas ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Munawir, S.Ag., M. Ag selaku kepala progam studi ekonomi syariah Universitas KH. Mukhtar Syafaat darussalam blokagung Banyuwangi.
6. Imam Muslih, A.Md., S.E., M.E. selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala bimbingan, masukan, kritikan, waktu dan juga tegala yang telah diberikan dengan penuh kesabaran.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Darussalam Blokagung Banyuwangi.
8. Petugas Dan warga yang ada di PT.Pegadaian Syariah simpang lima Banyuwangi.
9. Seluruh Teman-teman Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021 fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Banyuwangi, 9 Juli 2025 Penulis

Niswa Alfriza Aulia Yusnitha
NIM: 2113111060

The Essence of Family Planning in Islam: Achieving Family Well-Being Through Maqashid Shariah
(Ahmad Fauzi, et al)

Contextualization of Polygamy Law; Justification of Islamic Legal Principles against Positive Regulations in Indonesia
(Muhammad Nur, & Dhiaudin Tanjung)

Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia dan Mesir
(Riski Adelina, & Zulkarnain)

Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Kawin Kontrak dalam Ranah Keperdataan; Urgensi Formulasi Hukum
(Hanipah Vina Yulianti, & Candra Hayatul Iman)

Polygamy and Nikah Sirri Culture of Agen Thrifting Families in Teluk Nibung: An Islamic Family Law Perspective
(Juli Mardiana, et al)

Disputes Over the Number of Votes in the Simangambat Village Head Election from the Perspective of Siyasaq Qadhaiyah
(Amalia Putri Audy Zahra, & Khalid)

Analisis Yuridis Peralihan Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Sepengetahuan Kreditur
(Yafiz Arya Dharma, & Syaddan Dintara Lubis)

Opportunities and Challenges of Islamic Economics in Empowering Agrarian Communities
(Rezki Agrisa Ditama, et al)

Business Ethics in Islamic Perspective: Basic Concepts, Application, and True Success
(Samsidar, et al)

ANALYSIS OF THE FATWA OF THE NATIONAL SHARIA COUNCIL OF THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL ON THE RAHN CONTRACT AT PT PEGADAIAN SYARIAH SIMPANG LIMA BANYUWANGI

Niswa Alfriza Aulia Yusnitha

KH Mukhtar Syafaat University Banyuwangi, indonesia

Email: niswayusnitha@gmail.com

Imam Muslih

KH Mukhtar Syafaat University Banyuwangi, indonesia

email: imammuslih86@gmail.com

-

Abstract

The main objective of this research is to analyze the extent to which the implementation of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council on the rahn contract at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi can ensure compliance with sharia principles, while contributing to the socio- economic welfare of the local community. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method, analyzing the implementation of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council on the rahn contract at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi. The research subjects included three informants, namely Sharia Pawnshop employees, customers, and sharia practitioners. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was

conducted using the Miles and Huberman interactive method, with validity maintained through triangulation of sources, methods, and theories. The results of this study indicate that the application of the rahn contract at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi has tried to follow sharia principles based on the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, but still faces challenges in less intensive field supervision, which can affect the objectivity of the valuation of collateral. Sharia pawn products are also proven to increase inclusive and fair access to finance for the lower-middle economic community, helping to meet urgent needs without involving interest (riba). However, Islamic financial literacy among customers is still limited, so more intensive education is needed to strengthen their understanding of the principles of the rahn contract.

Keywords: Fatwa of the National Sharia Council, Indonesian Ulema Council, Rahn Agreement, Sharia Pawn.

INTRODUCTION

The rahn agreement in Islamic law has been known since the time of the Prophet, which functions as a guarantee or collateral for a loan (Lubaba, 2020). In Indonesia, the development of the rahn contract has become more systematic with the existence of Islamic financial institutions, one of which is the Sharia Pegadaian (Wijaya, 2022; HS & Soemitra, 2022). Sharia Pegadaian provides a solution for the community to borrow money with the guarantee of valuables, but in accordance with sharia principles that are free from usury, gharar, and maysir (Azizah, 2024). The fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council plays an important role in providing guidelines and provisions regarding rahn contracts that are in accordance with sharia principles. In its fatwa, the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council states that the rahn contract can be implemented as long as it meets certain conditions, including that the pledged goods must have clear rights, the value of the collateral must be proportional to the debt given, and there is no element of usury or practices that harm one of the parties. This fatwa aims to ensure that Islamic pawn practices do not violate the principles of fairness and transparency in transactions (Nasrullah, 2024).

PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi, the application of the rahn contract has become one of the superior products in providing financial services to the community. Sharia Pawnshops in Banyuwangi follow the provisions stipulated in the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, which provides a sense of security and comfort for customers who need loans with collateral (Ghozali, 2019; Harahap et al., 2021). Socially, this service is very helpful for people who often face economic difficulties or urgent needs, such as education costs, medical treatment, or other consumption needs. Sharia pawnshops have become an important option for the lower middle class who need access to finance without being trapped in usury practices. However, although this product facilitates the financial needs of the community, education and supervision are still

needed so that transactions continue to run in accordance with sharia provisions and do not cause losses to the parties involved. Thus, the analysis of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council on the rahn contract in Pegadaian Syariah does not only focus on legality and sharia compliance, but also has an impact on social welfare, provides solutions to people's economic problems, and reduces dependence on conventional financial institutions that are potentially burdensome .

Several previous studies have discussed the implementation of Islamic rahn contracts in Islamic financial institutions, as well as how the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council provides guidelines for the practice of Islamic pawning. One of the relevant studies was conducted by Qolbi et al., (2024) which analyzes the application of the rahn contract in Islamic Pawnshops and how the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council affects the operation of the product.

The study showed that although in theory, the rahn contract is in accordance with sharia principles, its implementation often encounters challenges in terms of transparency and collateral value. This research highlights the importance of customers' and employees' in-depth understanding of the provisions of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council fatwa, as well as the role of education in ensuring transactions are in accordance with Islamic law. Other relevant research is conducted by Sandberg & Cranmer, (2019) who discussed the economic and social impacts of Islamic pawn practices on the lower middle class in East Java. Sandberg & Cranmer, found that Islamic pawn services, including those implemented in Pegadaian Syariah, are very helpful for the community in meeting urgent needs without being trapped in usury practices. However, the study also pointed out the need to improve the understanding of sharia provisions among the parties involved, to avoid abuse. This study pays attention to the influence of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council in increasing public trust in Islamic pawn products and supporting local economic development (Ahmed et al., 2022).

The novelty of this research lies in a more in-depth analytical approach to the implementation of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council on the rahn contract at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi, focusing on its impact on the local community and the accuracy of sharia implementation in pawn practices. Although many previous studies have discussed the rahn contract in general, this research makes a new contribution by examining specifically one branch of the Sharia Pawnshop in Banyuwangi, which has rarely been the focus of study. This research not only assesses the legal aspects and compliance with the fatwa of

the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, but also looks in detail at how the application of sharia principles in the rahn contract at the operational level can affect the financial access of more vulnerable local communities, especially in the context of their economic welfare. In addition, this research adds a new dimension to socio-economic understanding by linking the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, which serves as sharia guidance, with the reality of the financial needs of the people in the area.

The main objective of this study is to analyze the extent to which the implementation of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council on the rahn contract at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi can ensure compliance with sharia principles, while contributing to the socio- economic welfare of the local community. This research focuses on the implementation of the rahn contract as an Islamic financial instrument that provides financing solutions for people who need funds secured by goods, but still prioritizes compliance with Islamic law, especially related to the prohibition of usury, gharar, and maysir. One of the strong arguments underlying this research is that the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council has a crucial role in shaping the operational guidelines of Islamic financial institutions, including Pegadaian Syariah, so that the products and services offered are not only in accordance with sharia provisions, but also provide real benefits to the community (Ihyak et al., 2023).

The application of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council in the rahn contract will create a system that is transparent, fair, and does not harm either party, both customers and financial institutions. Basically, the rahn contract can help people get access to financing, without proper supervision and application of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, the product is at risk of abuse or injustice in transactions. Therefore, the purpose of this study is to identify the challenges faced by Sharia Pawnshops in implementing the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council and to provide recommendations that can improve and refine the practice of Islamic pawning in the future, so that it can provide wider economic benefits for the Banyuwangi community.

RESEARCH METHODS

The research method used in this study is a descriptive qualitative approach with a case study method. This research focuses on analyzing the application of the fatwa of the National

Sharia Council of the Indonesian Ulema Council regarding the rahn contract at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi. The research subjects totaled 3 informants including PT Pegadaian Syariah employees who were directly involved in the rahn contract process, customers who used the service, and relevant sharia experts or practitioners (Ramdhan, 2021). The sampling technique was purposive to ensure that the selected informants had relevance to the research topic. Primary data was obtained through in-depth interviews with informants, direct observation of the rahn contract process, and documentation of related policies and procedures. Secondary data included literature on DSN MUI fatwas, Islamic financial regulations, and internal documents of PT Pegadaian Syariah. Data collection was carried out systematically to understand compliance with sharia principles and its impact on the socio-economic welfare of the community. Data analysis used the Miles and Huberman interactive analysis method, which involves an iterative process of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was maintained through triangulation of methods, sources, and theories, so that the research results can accurately describe the application of the DSN MUI fatwa and its contribution to the development of the Islamic financial system in the community (Walliman, 2021).

RESULTS AND DISCUSSION

The application of the sharia rahn (pawn) contract at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi has become one of the important solutions for the community in meeting financing needs without involving the element of usury, which is contrary to Islamic principles. This rahn agreement, which has been regulated in the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, provides security for the lender by using valuable goods as collateral. Nevertheless, the implementation of the rahn contract in the field is not free from challenges, both in terms of compliance with sharia, transparency in the valuation of collateral, and education to customers about the underlying sharia principles. This study aims to analyze the extent of the implementation of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council in the practice of sharia pawning in Pegadaian Syariah, as well as its impact on the socio-economic welfare of the community. The following are findings that can provide a clearer picture of the application and challenges faced by Pegadaian Syariah in managing the rahn contract in accordance with sharia provisions.

1. Compliance with Sharia Principles in Sharia Pawn

Procedures

One of the main points in this research is how PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi tries to maintain compliance with sharia principles in carrying out the rahn contract. In the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, the rahn contract is regulated to ensure that there are no elements of usury, gharar, and maysir that can harm one party. PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi strives to ensure that the pawn procedures implemented are in accordance with sharia provisions, especially in terms of valuing collateral. Pawned goods must have a value comparable to the debt given, and transactions are carried out with full transparency to avoid exploitative practices against customers. Nonetheless, there are concerns related to less intensive supervision in the field, which allows for irregularities to occur, especially in terms of the valuation of collateral that can be subjective and not fully in accordance with sharia principles.

This researcher was corroborated by conducting an interview with one of the Pawnshop Staff of PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi regarding the procedures applied in valuing collateral. The following are excerpts from the results of the interview:

"We always try to follow the guidelines in the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, which is to ensure that the collateral has a fair value and is proportional to the loan amount.

Valuations are conducted by experienced officers and have clear criteria. However, we also recognize that in practice, valuations can be subjective, and although there are procedures in place, supervision in the field can sometimes be less intensive. We continue to strive to improve transparency and objectivity in appraisals to avoid any discrepancies."

The results of this interview confirm that although PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi has followed the provisions of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, there are still challenges in ensuring that collateral valuation procedures are carried out objectively and in accordance with sharia principles. The lack of strict supervision in the field has the potential to open up opportunities for irregularities, which can harm either party, both the customer and the institution itself. Therefore, it is important to improve the quality of supervision and training for officers conducting valuations so that they are in accordance with established sharia standards.

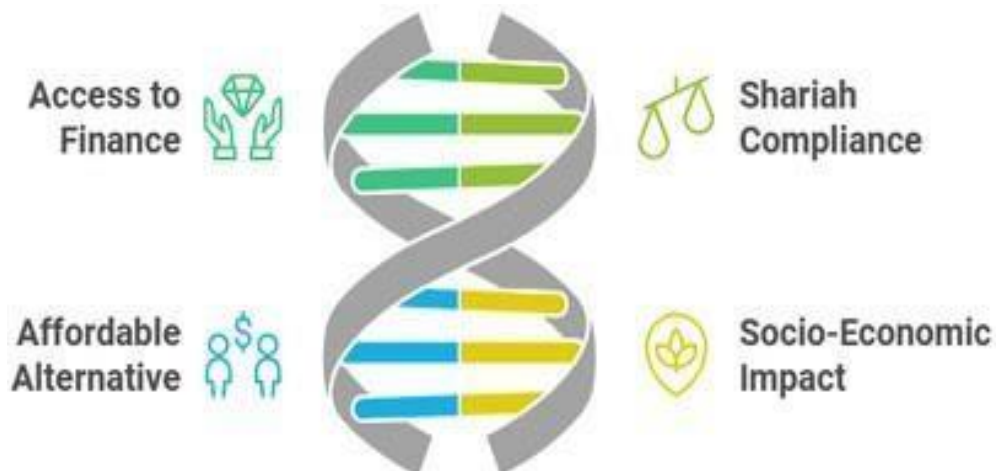
1. Improved Access to Finance for the Lower Middle

Income Community

The findings reveal that sharia pawn services at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi have had a positive impact on increasing access to finance for the community, especially from the middle to lower economic classes. Many customers feel that this Islamic pawn product provides a fair and easy solution to get quick funds without being entangled in the high interest practices often found in conventional financial institutions. For people who have difficulty accessing Islamic banking services or other formal finance, Islamic pawn products are a very relevant and helpful alternative in meeting urgent needs such as education, health, or daily consumption needs. Not only that, this product is also considered safer because it does not involve interest (riba), which is the main reason for many customers who want to avoid practices that are not in accordance with Islamic principles. To better understand the socio-economic impact felt by the community, researchers conducted an interview with a customer who regularly uses sharia pawn services at Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi. The following is an excerpt of the interview:

"Very helpful. I usually use this service for urgent needs, such as children's education fees or urgent household needs. At Pegadaian Syariah, the process is fast and there is no burdensome interest, so I feel safer. I had previously applied for a loan at a conventional bank, but the high interest rate made it difficult for me. Here, I feel unburdened, because everything is in accordance with sharia and I only need to pawn my goods without worrying about usury interest."

The results of these interviews confirm that many customers feel that sharia pawn products at Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi provide a more affordable and suitable alternative to their needs, especially for people who lack access to formal financial institutions. Sharia pawn, which prioritizes the principle of fairness without any element of usury, is an



important solution for those who need quick funds in a way that is not financially burdensome. This product not only provides easier access, but also strengthens people's trust in Islamic financial institutions, as they feel safer and less burdened by the high interest rates found in conventional financial institutions. Islamic pawn services provided by PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi towards increasing financial access for the middle to lower economic community. This sharia pawn product, which prioritizes the principles of fairness and avoids usury, is a relevant and affordable alternative for those who have difficulty accessing conventional banking services. To illustrate how this service provides interconnected solutions for the community, here is a visualization in the form of an image.

Figure 1 Sharia pawn services

Figure 1 illustrates the relationship between the four main elements that influence the positive impact of Islamic pawn services. It starts with Easy Financial Access, which shows that Islamic pawn provides a quick solution for people who need funds. Islamic Pawn products then become the first choice because they prioritize the principle of Conformity with Sharia Principles, which ensures that transactions do not involve interest or usury. Furthermore, Islamic pawning becomes an Affordable Alternative for people who have difficulty obtaining funds from conventional financial institutions. All these elements culminate in Socio-Economic Impact, which shows that this service not only helps fulfill immediate needs, but also improves the socio-economic welfare of the community. Thus, this chart illustrates how each element is interrelated and contributes to an equitable and affordable financial solution.

1. Limited Customer Education on Sharia Principles

The findings show that although PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi has made efforts to educate customers about the sharia principles contained in the rahn contract, the level of public understanding of this is still limited. Many customers only understand the rahn contract in general and are not fully aware of the detailed sharia provisions underlying the transaction, such as the prohibition of usury, gharar and maysir. In fact, a deeper understanding of the provisions of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council is very important so that customers not only engage in transactions, but also understand their rights and obligations in the sharia contracts they enter into. More in-depth education about the

provisions of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council is expected to reduce the potential for abuse and increase customer confidence in the Islamic pawn products they use. Therefore, increased educational efforts, both on the part of Pegadaian Syariah and other institutions, are needed to ensure that Islamic pawn products are not only economically beneficial, but also properly understood from a sharia perspective. To dig deeper into this educational challenge, researchers conducted an interview with a customer who actively uses Islamic pawn services at Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi. The following is an excerpt from the interview:

"Actually, I know that this is a sharia product, but when asked about details such as the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council or more detailed rules, I still don't understand. I only know that there is no interest like in banks, so I feel safer. Maybe if there is further explanation or training on how this sharia system works, I will understand more. Sometimes, I just follow the procedure, without really understanding why it has to be that way."

The results of these interviews confirm that although customers feel that Islamic pawn products are safer because they do not involve interest, their understanding of the sharia principles in the rahn contract is still limited. This points to the need for more intensive educational efforts so that customers not only use the service practically, but also understand the fundamentals of sharia law that govern it. More structured and easy-to-understand education on the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council and other sharia principles will strengthen customers' position in transactions, and increase their trust in Islamic pawn products.

DISCUSSION

1. Compliance with Sharia Principles in Sharia Pawn Procedures

Interviews with staff at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi indicate a significant effort to follow the fatwa guidelines of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council in the implementation of the rahn contract, especially in terms of valuing collateral. However, as revealed in the interviews, there are challenges related to less intensive supervision in the field, which can potentially lead to subjectivity in valuation. This reflects that although procedures and guidelines have been established, the practice on the ground still has room for improvement in terms of objectivity and transparency.

From a theoretical perspective, this finding is in line with *agency* theory which explains the possibility of deviation or information asymmetry between those who manage the institution and customers (Aldosari, 2023). In the context of sharia pawning, agents (Pegadaian) have an obligation to act in accordance with sharia principles, but there is a potential mismatch between the procedures applied and the reality in the field, especially in terms of valuing collateral that can be subjective. In line with research by Imaniyati et al., (2019) which identified the importance of supervision in Islamic financial institutions to prevent non-compliance with sharia, these findings suggest that stricter supervision and ongoing training for officers are necessary to maintain the integrity of the system.

Previous studies also show that weaknesses in internal control are often one of the main causes of violations in Islamic financial institutions Lin et al., (2018). Therefore, this study recommends that PT Pegadaian Syariah further strengthen the supervisory system and provide more intensive training for collateral appraisal officers to ensure that sharia pawn practices are carried out in full compliance with sharia provisions and the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

1. Improved Access to Finance for the Lower Middle Income Community

The results of the interviews show that the sharia pawn service at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi provides an effective solution for middle to lower economic communities, who have difficulty accessing conventional financial institutions. Customers feel greatly helped by sharia pawn products, because the process is fast, without burdensome interest, and in accordance with sharia principles. This reflects a positive impact in providing fairer and more affordable access to finance, especially for those who need quick funds without being entangled in the often burdensome practice of interest. From a theoretical perspective, this finding is in line with *financial inclusion* theory, which emphasizes the importance of fair and inclusive access to finance for all levels of society, especially groups that are marginalized or do not have adequate access to traditional banking institutions (Fabe et al., 2022)..

Research by Prabhakar, (2021) identified that inclusive financial services that comply with sharia principles can reduce inequity in the distribution of financial access. In this context, Islamic pawn products serve as a more friendly

alternative for people who are often overlooked by the conventional banking system. In addition, a study by Judijanto et al, (2024) shows that people who use Islamic financial products tend to feel safer and more valued, as they avoid usury interest which is considered harmful from an Islamic perspective. This finding confirms that PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi has successfully filled the gap by providing easier access and in accordance with sharia principles, while strengthening public trust in Islamic financial institutions. Therefore, Islamic pawn products not only help fulfill urgent needs, but also improve the overall economic welfare of the community.

1. Limited Customer Education on Sharia Principles

The interview results show that although customers feel that sharia pawn products at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi are safer because there is no interest, their understanding of sharia principles, such as the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council and other provisions, is still limited, indicating a lack of education. Customers tend to only understand the rahn contract in general terms, without a deep understanding of the sharia mechanisms underlying the transaction. This finding highlights the importance of more intensive and structured educational efforts to improve Islamic financial literacy among the public. A better understanding of the rights and obligations in sharia contracts will not only reduce the potential for abuse, but also strengthen customer confidence in sharia pawn products.

From a theoretical perspective, this finding can be understood in the context of *financial literacy*, which includes customers' understanding of financial products, their rights and obligations, and the principles underlying these transactions Jia et al. Research by Lusardi & Messy, (2023) shows that low financial literacy can lead to errors in financial decision making and is vulnerable to potential abuse. In this context, customers' low understanding of sharia principles suggests the need for a more systematic approach in improving education about sharia products.

Previous study by Talib et al, (2024) also emphasized that more structured education on sharia principles is essential to build trust and mitigate the risk of abuse in Islamic financial institutions. By improving customers' understanding of the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council and other sharia mechanisms, Pegadaian

Syariah can strengthen its position as an institution that not only provides fair and transparent financial solutions, but also helps improve sharia financial literacy among the public.

CONCLUSIONS

This research reveals several important findings related to the application of the sharia rahn (pawn) contract at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi. First, compliance with sharia principles in sharia pawn procedures has been pursued through the valuation of collateral in accordance with the provisions of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. However, there are still challenges in the form of a lack of supervision intensity in the field, which has the potential to cause subjectivity in the valuation of goods. This points to the need to strengthen supervision and training of officers to improve objectivity and transparency. Secondly, increasing access to finance for the lower-middle economic community through sharia pawn products has proven to provide an inclusive, fair and affordable solution, especially for people who have difficulty accessing conventional financial services. This product not only helps fulfill urgent needs, but also improves the socio-economic welfare of the community. Third, customer education on sharia principles is still limited, so many customers only understand the rahn contract in general without knowing the details of the sharia provisions underlying the transaction. This low Islamic financial literacy is an important challenge that requires more intensive and structured educational efforts so that customers can understand their rights, obligations, and the principles governing sharia contracts. By improving supervision, accessibility and education, Pegadaian Syariah can further strengthen its role as a credible Islamic financial institution that benefits the community.

LITERATURE

Ahmed, F. ... Jones, B. (2022). Cultural Voluntarism and Sharia Processes in Australia. In J. Scherpe & S. Gilmore (Eds.), *Family Matters: Essays in Honour of John Eekelaar* (pp. 211–226). Intersentia. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781839703102.015>

Aldosari, S. A. M. (2023). RETRACTED ARTICLE: The relationship between leaders' mastery of tacit knowledge management skills and the achievement of competitive advantage at universities. *Journal of Sustainable Finance &*

Azizah, L. (2024). *Antam Gold Financing Marketing Strategy Innovation on Arrum Hajj Products*.

Candland, C. (Ed.). (2024). Islam and the Social Welfare Ideal. In *The Islamic Welfare State: Muslim Charity, Human Security, and Government Legitimacy in Pakistan* (pp. 1–18). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781009268455.003>

Cherla, A. ... Mossialos, E. (2021). The ‘Netflix plus model’: can subscription financing improve access to medicines in low- and middle-income countries? *Health Economics, Policy and Law*, 16(2), 113–123. <https://doi.org/DOI:10.1017/S1744133120000031>

Fabe, A. P. ... Laksmi, S. (2022). The Growth of Financial Technology in Indonesia: Implications for Terrorism Financing. *International Annals of Criminology*, 60(2), 162–181. <https://doi.org/DOI:10.1017/cri.2022.16>

Fitriyanti, F. ... Nurhaifa, R. F. (2023). Application of Sharia Principles in Sharia Financial Institutions. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 157–166.

Ghozali, M. (2019). LEGAL ANALYSIS ON THE FATWA OF SHARIA NATIONAL COUNCIL ON RAHN: Between Legal Philosophy and Its Implementation in Indonesia Sharia Pawnshop Implementation in Indonesia Sharia Pawnshop. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 76–115.

Harahap, R. A. ... Muda, I. (2021). Sharia Pawnshop: The Pawnshops Issue Sharia Based Products. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(9).

HS, W. H., & Soemitra, A. (2022). Fiqh Muamalah Sharia Pawnshop. *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET)*, 1(3), 250–261.

Ihyak, M. ... Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review).

Enrichment: Journal of Management, 13(2), 1560–1567.

Imaniyati, N. S. ... Jamilah, L. (2019). Analysis of the role and

responsibility of Sharia supervisory board (DPS) on Sharia compliance supervision in Islamic banks in Indonesia. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 22, 1.

Jia, X. ... Lobo, G. J. (2024). Financial Literacy and IPO Underpricing. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 59(3), 1430–1469. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0022109023000315>

Johnson, J. ... Sharfstein, J. M. (2022). INTRODUCTION Disrupting the Status Quo: Building Equitable Access to HIV PrEP in the US through Innovative Financing. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 50(S1), 5–7. <https://doi.org/DOI:10.1017/jme.2022.29>

Judijanto, L. ... Lucky, M. (2024). Identification of Research Trends in Islamic Financial Product Innovation. *West Science Interdisciplinary Studies*, 2(02), 467–474.

Lin, Y.-H. ... Huang, H.-W. (2018). Internal control material weaknesses and foreign corrupt practices act violations. *Journal of Forensic Accounting Research*, 3(1), A80–A104.

Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program*, 1(2), 49–58.

Lusardi, A., & Messy, F.-A. (2023). The importance of financial literacy and its impact on financial wellbeing. *Journal of Financial Literacy and Wellbeing*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/DOI:10.1017/flw.2023.8>

Nasrullah, M. (2024). Implementation of Fiqh Rules in Economic Transactions in Islamic Financial Institutions: A Literature Review Study. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(3), 347–360.

Prabhakar, R. (Ed.). (2021). Financial inclusion and saving. In *Financial Inclusion: Critique and Alternatives* (pp. 45–70). Bristol University Press. <https://doi.org/DOI:10.46692/9781447355946.004>

Qolbi, F. A. ... Nugroho, M. S. F. (2024). Development and Application of Akad Rahn in Nash Perspective.

Demak Universal Journal of Islam and Sharia, 2(01), 47–54.
Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara

Ridwan, R., & Mayapada, A. G. (2022). Does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in Indonesia Islamic banks? *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(2), 299–318. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819>

Sandberg, R., & Cranmer, F. (2019). The Council of Europe and Sharia: An Unsatisfactory Resolution? *Ecclesiastical Law Journal*, 21(2), 203–212. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0956618X19000073>

Sumpf, A. (Ed.). (2022). Discriminatory Social Welfare. In *The Broken Years: Russia's Disabled War Veterans, 1904–1921* (pp. 136–193). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781009047296.005>

Talib, A. ... Al-Amin, A.-A. (2024). Challenges and Opportunities in Implementing Sharia Principles in Business Management. *International Journal of Sharia Business Management*, 3(1), 1–8.

Walliman, N. (2021). *Research methods: The basics*. Routledge.

Wijaya, N. H. (2022). the Challenges of Sharia Pawnshops in Indonesia in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *El-Mashlahah*, 12(1), 52–69.

Ridwan, R., & Mayapada, A. G. (2022). Does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in Indonesia Islamic banks? *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(2), 299–318. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819>

Sandberg, R., & Cranmer, F. (2019). The Council of Europe and Sharia: An Unsatisfactory Resolution? *Ecclesiastical Law Journal*, 21(2), 203–212. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0956618X19000073>

Sumpf, A. (Ed.). (2022). Discriminatory Social Welfare. In *The Broken Years: Russia's Disabled War Veterans, 1904–1921* (pp. 136–193). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781009047296.005>

Talib, A. ... Al-Amin, A.-A. (2024). Challenges and Opportunities in Implementing Sharia Principles in Business

Management. *International Journal of Sharia Business Management*, 3(1), 1–8.

Walliman, N. (2021). *Research methods: The basics*. Routledge.

Wijaya, N. H. (2022). the Challenges of Sharia Pawnshops in Indonesia in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *El-Mashlahah*, 12(1), 52–69

JURISPRUDENSI

Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam

<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i2.1055>
7 Vol. 17 No. 2 (July-December 2025): 54-68

ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA AKAD RAHN DI PT PEGADAIAN SYARIAH SIMPANG LIMA BANYUWANGI

Niswa Alfriza Aulia Yusnitha Imam Muslih

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi

Email: niswaalfriza@gmail.com, imammuslih86@gmail.com

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap akad rahn di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, menganalisis penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang akad rahn di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi. Subjek penelitian mencakup tiga informan, yaitu pegawai Pegadaian Syariah, nasabah, dan praktisi syariah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman, dengan validitas dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad rahn di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi telah berupaya mengikuti prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, namun masih menghadapi tantangan dalam pengawasan lapangan yang kurang intensif, yang dapat memengaruhi objektivitas penilaian barang jaminan. Produk gadai syariah juga

terbukti meningkatkan akses keuangan yang inklusif dan adil bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, membantu memenuhi kebutuhan mendesak tanpa melibatkan bunga (riba). Namun, literasi keuangan syariah di kalangan nasabah masih terbatas, sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip akad rahn.

Kata kunci : Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Akad Rahn, Gadai Syariah

PENDAHULUAN

Akad rahn dalam hukum Islam telah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang berfungsi sebagai jaminan atau agunan atas suatu pinjaman (Lubaba, 2020). Di Indonesia, pengembangan akad rahn menjadi lebih sistematis dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah Pegadaian Syariah (Wijaya, 2022; HS & Soemitra, 2022). Pegadaian Syariah memberikan solusi kepada masyarakat untuk meminjam uang dengan jaminan barang berharga, namun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir (Azizah, 2024). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memainkan peran penting dalam memberikan pedoman dan ketentuan mengenai akad rahn yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam fatwanya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa akad rahn dapat dilaksanakan asalkan memenuhi ketentuan tertentu, antara lain barang yang digadaikan harus jelas haknya, nilai jaminan harus sebanding dengan utang yang diberikan, dan tidak ada unsur riba atau praktik yang merugikan salah satu pihak (Ridwan & Mayapada, 2022; Fitriyanti et al., 2023). Fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik gadai syariah tidak melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi (Nasrullah, 2024).

PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi, penerapan akad rahn telah menjadi salah satu produk unggulan dalam memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. Pegadaian Syariah di Banyuwangi mengikuti ketentuan yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi

nasabah yang membutuhkan pinjaman dengan jaminan (Ghozali, 2019; Harahap et al., 2021). Secara sosial, layanan ini sangat membantu masyarakat yang seringkali menghadapi kesulitan ekonomi atau kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, pengobatan, atau kebutuhan konsumsi lainnya. Pegadaian Syariah telah menjadi pilihan penting bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan akses keuangan tanpa harus terjebak

dalam praktik riba (Cherla et al., 2021; Johnson et al., 2022). Namun, meskipun produk ini memfasilitasi kebutuhan keuangan masyarakat, tetap diperlukan edukasi dan pengawasan agar transaksi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Dengan demikian, analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap akad rahn di Pegadaian Syariah tidak hanya berfokus pada legalitas dan kepatuhan syariah, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial, memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional yang berpotensi memberatkan (Sumpf, 2022; Candland, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang implementasi akad rahn syariah di lembaga keuangan syariah, serta bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan pedoman dalam praktik gadai syariah tersebut. Salah satu penelitian yang relevan adalah yang dilakukan oleh Qolbi et al., (2024), yang menganalisis penerapan akad rahn di Pegadaian Syariah dan bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mempengaruhi operasional produk tersebut.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara teori, akad rahn telah sesuai dengan prinsip syariah, implementasinya sering kali menemui tantangan dalam hal transparansi dan nilai jaminan.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam dari nasabah dan pegawai mengenai

ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta peran edukasi dalam memastikan transaksi berjalan sesuai dengan hukum Islam. Penelitian lain yang relevan adalah yang dilakukan oleh Sandberg & Cranmer, (2019), yang membahas tentang dampak ekonomi dan sosial dari praktik gadai syariah terhadap masyarakat menengah ke bawah di Jawa Timur. Sandberg & Cranmer, menemukan bahwa layanan gadai syariah, termasuk yang diterapkan di

Pegadaian Syariah, sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak tanpa terjebak dalam praktik riba. Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki pemahaman tentang ketentuan syariah pada pihak-pihak yang terlibat, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Penelitian ini memberi perhatian pada pengaruh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk gadai syariah dan mendukung perkembangan ekonomi lokal (Ahmed et al., 2022).

Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang lebih mendalam terhadap implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada akad rahn di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi, dengan fokus pada dampaknya terhadap masyarakat lokal serta ketepatan pelaksanaan syariah dalam praktik gadai. Meskipun banyak penelitian terdahulu yang membahas akad rahn secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan meneliti secara spesifik pada satu cabang Pegadaian Syariah di Banyuwangi, yang selama ini jarang menjadi fokus kajian. Penelitian ini tidak hanya menilai aspek legalitas dan kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, tetapi juga melihat secara rinci bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad rahn di tingkat operasional dapat mempengaruhi akses keuangan masyarakat lokal yang lebih rentan, terutama dalam konteks kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi baru dalam pemahaman sosial-ekonomi dengan menghubungkan antara fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang berfungsi sebagai pedoman syariah, dengan realitas kebutuhan keuangan masyarakat di daerah tersebut.

Tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap akad rahn di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini berfokus pada implementasi akad rahn sebagai instrumen keuangan syariah yang memberikan solusi pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan jaminan barang, namun tetap mengutamakan kepatuhan terhadap hukum Islam, terutama terkait dengan larangan riba, gharar, dan maysir. Salah satu argumen kuat yang mendasari penelitian ini adalah bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki peran krusial dalam membentuk pedoman operasional

lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, agar produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Ihyak et al., 2023).

Penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam akad rahn akan menciptakan sistem yang transparan, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu nasabah maupun lembaga keuangan. Pada dasarnya akad rahn dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses pembiayaan, tanpa pengawasan dan penerapan yang tepat terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, produk tersebut berisiko menimbulkan penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam transaksi.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah dalam implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan praktik gadai syariah di masa depan, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Banyuwangi.

LANDASAN TEORI

Dalam upaya memperkuat inklusi keuangan dan memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, Lembaga Keuangan Syariah non-bank seperti Pegadaian Syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan menawarkan produk gadai syariah atau akad rahn, Pegadaian Syariah menjadi solusi bagi individu dan usaha kecil yang memerlukan akses cepat terhadap dana tanpa melibatkan unsur riba. Pemahaman mengenai konsep LKS non-bank, gadai syariah, fiqh muamalah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan kunci untuk memahami bagaimana akad rahn diimplementasikan di lembaga ini, serta bagaimana praktik tersebut sejalan dengan nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap landasan teori ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan akad rahn di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi.

1. LKS non-bank

lembaga keuangan berbasis syariah yang menyediakan layanan finansial bagi masyarakat, namun berbeda dengan perbankan karena tidak menerima simpanan seperti tabungan atau deposito. Contoh LKS

non-bank adalah Pegadaian Syariah, yang menawarkan pembiayaan berbasis gadai syariah (rahn) sebagai alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah. LKS non-bank memiliki peran penting dalam inklusi keuangan, karena menjangkau masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal. Selain itu, keberadaan LKS non-bank memperluas pilihan pembiayaan bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan dana cepat tanpa melibatkan bunga atau unsur riba (Afrianty et al., 2019).

1. Fiqih muamalah

Cabang ilmu fiqih yang membahas hukum-hukum Islam terkait dengan transaksi dan hubungan sosial-ekonomi antarindividu. Dalam konteks gadai syariah, fiqih muamalah menyediakan kerangka hukum yang mengatur bagaimana transaksi rahn harus dilakukan agar sesuai dengan syariah. Prinsip utama dalam fiqih muamalah adalah menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), sehingga setiap transaksi dilakukan dengan adil dan transparan. Fiqih muamalah juga menegaskan pentingnya akad atau perjanjian yang sah dalam setiap transaksi, termasuk dalam gadai syariah (Permana, 2021).

Dengan memahami landasan teori yang mencakup LKS non-bank dan fiqih muamalah, penelitian ini berupaya untuk menganalisis pelaksanaan akad rahn di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana akad rahn berfungsi sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana, tetapi juga menjaga integritas syariah dan etika dalam setiap transaksi. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah sebagai solusi yang adil dan transparan. Dengan landasan teori ini, pelaksanaan akad rahn di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi dapat dianalisis berdasarkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah, keadilan, serta peran LKS non-bank dalam mendukung keuangan syariah yang inklusif dan bebas dari riba.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia mengenai akad rahn yang berada di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi. Subjek penelitian berjumlah 3 informan diantaranya pegawai PT Pegadaian Syariah yang terlibat langsung dalam proses akad rahn, nasabah yang menggunakan layanan tersebut, serta ahli atau praktisi syariah yang relevan (Walliman, 2021). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposif untuk memastikan informan yang dipilih memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung terhadap proses akad rahn, serta dokumentasi kebijakan dan prosedur terkait. Data sekunder meliputi literatur tentang fatwa DSN MUI, regulasi keuangan syariah, dan dokumen internal PT Pegadaian Syariah. Pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis untuk memahami kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman, yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif. Validitas data dijaga melalui triangulasi metode, sumber, dan teori, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara akurat penerapan fatwa DSN MUI serta kontribusinya terhadap pengembangan sistem keuangan syariah di masyarakat (Ramdhan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akad rahn (gadai) syariah di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi telah menjadi salah satu solusi penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa melibatkan unsur riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Akad rahn ini, yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, memberikan jaminan bagi pihak pemberi pinjaman dengan menggunakan barang berharga sebagai agunan. Meskipun demikian, implementasi akad rahn di lapangan tidak luput dari tantangan, baik dalam hal kepatuhan terhadap syariah, transparansi dalam penilaian barang jaminan, maupun edukasi kepada nasabah tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam praktik gadai syariah di Pegadaian Syariah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Berikut ini adalah temuan-temuan yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang penerapan dan tantangan yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah dalam mengelola akad rahn sesuai dengan ketentuan syariah.

1. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah dalam Prosedur Gadai Syariah

Salah satu poin utama dalam penelitian ini adalah bagaimana PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi berusaha untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menjalankan akad rahn. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akad rahn diatur untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar, dan maysir yang dapat merugikan salah satu pihak. PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi berupaya untuk memastikan bahwa prosedur gadai yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya dalam hal penilaian barang jaminan. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai yang sebanding dengan utang yang diberikan, dan transaksi dilakukan dengan transparansi penuh untuk menghindari praktik eksploitasi terhadap nasabah. Meskipun demikian, ada kekhawatiran terkait dengan pengawasan yang kurang intensif di lapangan, yang memungkinkan terjadinya penyimpangan, terutama dalam hal penilaian nilai barang jaminan yang bisa subjektif dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Peneliti ini dikuatkan dengan melakukan wawancara dengan salah seorang Staf Pegadaian PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi mengenai prosedur yang diterapkan dalam penilaian barang jaminan. Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara tersebut:

"Kami selalu berusaha mengikuti pedoman yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu memastikan bahwa barang jaminan memiliki nilai yang wajar dan sebanding dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Penilaian dilakukan oleh petugas yang berpengalaman dan memiliki kriteria yang jelas. Namun, kami juga menyadari bahwa dalam praktiknya, penilaian bisa saja subjektif, dan meskipun ada prosedur yang mengatur, kadang pengawasan di lapangan bisa kurang intensif. Kami terus berusaha untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam penilaian untuk menghindari adanya ketidaksesuaian."

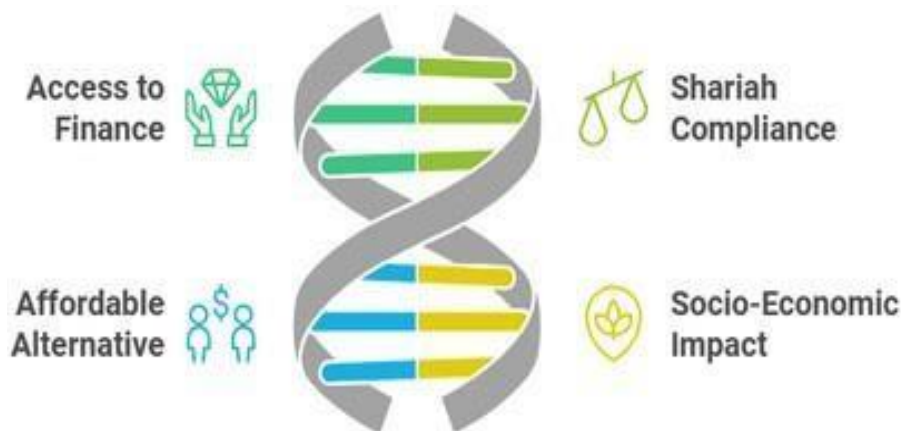
Hasil wawancara ini mengkonfirmasi bahwa meskipun PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi sudah mengikuti ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa prosedur penilaian barang jaminan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Kurangnya pengawasan yang ketat di lapangan berpotensi membuka peluang penyimpangan, yang bisa merugikan salah satu pihak, baik nasabah maupun lembaga itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk

meningkatkan kualitas pengawasan dan pelatihan bagi petugas yang melakukan penilaian agar sesuai dengan standar syariah yang telah ditetapkan.

1. Peningkatan Akses Keuangan untuk Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah

Pada Temuan ini mengungkapkan bahwa layanan gadai syariah di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Banyak nasabah yang merasa bahwa produk gadai syariah ini memberikan solusi yang adil dan mudah untuk mendapatkan dana cepat tanpa terjerat dalam praktik bunga tinggi yang sering ditemui di lembaga keuangan konvensional. Bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan perbankan syariah atau keuangan formal lainnya, produk gadai syariah menjadi alternatif yang sangat relevan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan konsumsi sehari-hari. Tidak hanya itu, produk ini juga dianggap lebih aman karena tidak melibatkan bunga (riba), yang menjadi alasan utama bagi banyak nasabah yang ingin menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Untuk lebih memahami dampak sosial-ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan seorang nasabah yang rutin menggunakan layanan gadai syariah di Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi. Berikut adalah kutipan wawancara tersebut:

"Sangat terbantu sekali. Saya biasa menggunakan layanan ini untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak atau keperluan rumah tangga yang mendesak. Di Pegadaian Syariah, prosesnya cepat dan tidak ada bunga yang memberatkan, jadi saya merasa lebih aman. Saya sebelumnya sempat mengajukan pinjaman di bank konvensional, tetapi beban bunga yang tinggi membuat saya kesulitan. Kalau di sini, saya merasa tidak terbebani, karena semuanya sesuai dengan syariah dan saya hanya perlu menggadaikan barang tanpa khawatir terkena bunga riba."



Simpang

Lima Banyuwangi memberikan alternatif yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama bagi masyarakat yang kurang memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Gadai syariah, yang mengutamakan prinsip keadilan tanpa ada unsur riba, menjadi solusi penting bagi mereka yang membutuhkan dana cepat dengan cara yang tidak memberatkan secara finansial. Produk ini tidak hanya memberikan akses yang lebih mudah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, karena mereka merasa lebih aman dan tidak terbebani oleh bunga tinggi yang ada di lembaga keuangan konvensional. Layanan gadai syariah yang disediakan oleh PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi terhadap peningkatan akses keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Produk gadai syariah ini, yang mengutamakan prinsip keadilan dan menghindari riba, menjadi alternatif yang relevan dan terjangkau bagi mereka yang kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional. Untuk menggambarkan bagaimana layanan ini memberikan solusi yang saling terkait bagi masyarakat, berikut adalah visualisasi dalam bentuk gambar.

Gambar 1 Layanan Gadai Syariah

Gambar 1 menggambarkan hubungan antara empat elemen utama yang mempengaruhi dampak positif layanan gadai syariah. Dimulai dengan Akses Keuangan Mudah, yang menunjukkan bahwa gadai syariah memberikan solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Produk Gadai Syariah kemudian menjadi pilihan utama karena mengutamakan prinsip Kesesuaian dengan Prinsip Syariah, yang menjamin bahwa transaksi tidak melibatkan bunga atau riba. Selanjutnya, gadai syariah menjadi Alternatif Terjangkau bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh dana dari lembaga keuangan konvensional. Semua elemen ini berujung pada

Dampak Sosial-Ekonomi, yang menunjukkan bahwa layanan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, bagan ini menggambarkan bagaimana setiap elemen saling terkait dan berkontribusi pada solusi keuangan yang adil dan terjangkau.

1. Edukasi Terhadap Nasabah tentang Prinsip Syariah yang Masih Terbatas

Pada Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi telah berupaya untuk mengedukasi nasabah tentang prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam akad rahn, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hal ini masih terbatas. Banyak nasabah yang hanya memahami akad rahn secara umum dan belum sepenuhnya menyadari detail ketentuan syariah yang mendasari transaksi tersebut, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Padahal, pemahaman yang lebih mendalam tentang ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sangat penting agar nasabah tidak hanya sekadar terlibat dalam transaksi, tetapi juga memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad syariah yang mereka jalani. Edukasi yang lebih mendalam tentang ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk gadai syariah yang mereka gunakan. Oleh karena itu, peningkatan upaya edukasi, baik dari sisi Pegadaian Syariah maupun lembaga lainnya, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk gadai syariah tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga dipahami dengan benar dalam perspektif syariah. Untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan edukasi ini, peneliti melakukan wawancara dengan seorang nasabah yang aktif menggunakan layanan gadai syariah di Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi. Berikut kutipan hasil wawancara:

"Sebenarnya, saya tahu kalau ini produk syariah, tapi kalau ditanya tentang detail-detail seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau aturan yang lebih rinci, saya masih kurang paham. Saya hanya tahu bahwa di sini tidak ada bunga seperti di bank, jadi saya merasa lebih aman. Mungkin kalau ada penjelasan lebih lanjut atau pelatihan tentang bagaimana sistem syariah ini bekerja, saya akan lebih mengerti. Kadang-kadang, saya hanya mengikuti prosedur yang ada, tanpa benar-benar memahami kenapa ini harus seperti itu."

Hasil wawancara ini mengonfirmasi bahwa meskipun nasabah merasa produk gadai syariah lebih aman karena tidak melibatkan bunga, pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah dalam akad rahn masih terbatas. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi yang lebih intensif agar nasabah tidak hanya menggunakan layanan tersebut secara praktis, tetapi juga memahami dasar-dasar hukum syariah yang mengaturnya. Edukasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan prinsip syariah lainnya akan memperkuat posisi nasabah dalam bertransaksi, serta meningkatkan rasa percaya mereka

terhadap produk gadai syariah.

Pembahasan

1. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah dalam Prosedur Gadai Syariah

Hasil wawancara dengan staf PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi mengindikasikan adanya upaya yang cukup signifikan untuk mengikuti pedoman fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan akad rahn, terutama dalam hal penilaian barang jaminan. Namun, seperti yang diungkapkan dalam wawancara, terdapat tantangan terkait dengan pengawasan yang kurang intensif di lapangan, yang dapat berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penilaian. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun prosedur dan pedoman telah ditetapkan, praktik di lapangan masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam hal objektivitas dan transparansi.

Dari perspektif teoritis, temuan ini sejalan dengan teori *agency* yang menjelaskan adanya kemungkinan penyimpangan atau asimetri informasi antara pihak yang mengelola lembaga dengan nasabah (Aldosari, 2023). Dalam konteks gadai syariah, agen (Pegadaian) memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun terdapat potensi ketidaksesuaian antara prosedur yang diterapkan dengan realitas di lapangan, terutama dalam hal penilaian barang jaminan yang dapat menjadi subyektif. Sejalan dengan penelitian oleh Imaniyati et al., (2019) yang mengidentifikasi pentingnya pengawasan dalam lembaga keuangan syariah untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap syariah, temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih ketat dan pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas sangat diperlukan untuk menjaga integritas sistem.

Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan internal sering kali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran dalam lembaga keuangan syariah Lin et al., (2018). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar PT Pegadaian Syariah lebih memperkuat sistem pengawasan dan memberikan pelatihan yang lebih intensif bagi petugas penilai barang jaminan untuk memastikan bahwa praktik gadai syariah yang dilakukan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1. Peningkatan Akses Keuangan untuk Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa layanan gadai syariah di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi memberikan solusi yang efektif bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, yang kesulitan mengakses lembaga keuangan konvensional. Nasabah merasa sangat terbantu dengan produk

gadai syariah, karena prosesnya yang cepat, tanpa bunga yang membebani, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencerminkan dampak positif dalam menyediakan akses keuangan yang lebih adil dan terjangkau, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana cepat tanpa terjerat dalam praktik bunga yang seringkali memberatkan. Dari perspektif teoritis, temuan ini sejalan dengan teori *financial inclusion*, yang menekankan pentingnya akses keuangan yang adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan atau tidak memiliki akses memadai ke lembaga perbankan tradisional (Fabe et al., 2022).

Penelitian oleh Prabhakar, (2021) mengidentifikasi bahwa layanan keuangan inklusif yang sesuai dengan prinsip syariah dapat mengurangi ketidakadilan dalam distribusi akses keuangan. Dalam konteks ini, produk gadai syariah berfungsi sebagai alternatif yang lebih ramah bagi masyarakat yang sering terabaikan oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, studi oleh Judijanto et al., (2024) menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan produk keuangan syariah cenderung merasa lebih aman dan dihargai, karena mereka terhindar dari bunga riba yang dianggap merugikan dalam perspektif Islam. Temuan ini mengonfirmasi bahwa PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi telah berhasil mengisi celah tersebut dengan memberikan akses yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, produk gadai syariah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

1. Edukasi Terhadap Nasabah tentang Prinsip Syariah yang Masih Terbatas

Hasil wawancara yang menunjukkan bahwa meskipun nasabah merasa produk gadai syariah di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi lebih aman karena tidak ada bunga, namun pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan lainnya, masih terbatas, mengindikasikan adanya kekurangan dalam aspek edukasi. Nasabah cenderung hanya memahami akad rahn secara umum, tanpa pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme syariah yang mendasari transaksi tersebut. Temuan ini menyoroti pentingnya upaya edukasi yang lebih intensif dan terstruktur untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam akad syariah tidak hanya akan mengurangi potensi penyalahgunaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap produk gadai syariah.

Dari perspektif teoritis, temuan ini dapat dipahami dalam konteks *financial literacy*, yang mencakup pemahaman nasabah terhadap produk keuangan, hak dan kewajiban mereka, serta prinsip-prinsip yang mendasari transaksi tersebut Jia et al., (2024). Penelitian oleh Lusardi & Messy, (2023)

menunjukkan bahwa literasi keuangan yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan finansial dan rentan terhadap potensi penyalahgunaan. Dalam konteks ini, rendahnya pemahaman nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam meningkatkan edukasi mengenai produk-produk syariah.

Studi sebelumnya oleh Talib et al., (2024) juga menekankan bahwa edukasi yang lebih terstruktur mengenai prinsip syariah sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memitigasi risiko penyalahgunaan dalam lembaga keuangan syariah. Dengan meningkatkan pemahaman nasabah tentang fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan mekanisme syariah lainnya, Pegadaian Syariah dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga yang tidak hanya menyediakan solusi keuangan yang adil dan transparan, tetapi juga membantu meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait penerapan akad rahn (gadai) syariah di PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi. Pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam prosedur gadai syariah telah diupayakan melalui penilaian barang jaminan yang sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan berupa kurangnya intensitas pengawasan di lapangan, yang berpotensi menyebabkan subjektivitas dalam penilaian barang. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan pelatihan petugas untuk meningkatkan objektivitas dan transparansi. Kedua, peningkatan akses keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah melalui produk gadai syariah terbukti memberikan solusi yang inklusif, adil, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan keuangan konvensional. Produk ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Ketiga, edukasi terhadap nasabah tentang prinsip syariah masih terbatas, sehingga banyak nasabah hanya memahami akad rahn secara umum tanpa mengetahui detail ketentuan syariah yang mendasari transaksi. Rendahnya literasi keuangan syariah ini menjadi tantangan penting yang memerlukan upaya edukasi lebih intensif dan terstruktur agar nasabah dapat memahami hak, kewajiban, serta prinsip-prinsip yang mengatur akad syariah. Dengan memperbaiki pengawasan, aksesibilitas, dan edukasi, Pegadaian Syariah dapat semakin memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianty, N. ... Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zigie Utama.

Ahmed, F. ... Jones, B. (2022). Cultural Voluntarism and Sharia Processes in Australia. In J. Scherpe & S. Gilmore (Eds.), *Family Matters: Essays in Honour of John Eekelaar* (pp. 211–226). Intersentia. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781839703102.015>

Aldosari, S. A. M. (2023). RETRACTED ARTICLE: The relationship between leaders' mastery of tacit knowledge management skills and the achievement of competitive advantage at universities. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 13(1), 142–160. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1886552>

Azizah, L. (2024). *Antam Gold Financing Marketing Strategy Innovation on Arrum Hajj Products*.

Candland, C. (Ed.). (2024). Islam and the Social Welfare Ideal. In *The Islamic Welfare State: Muslim Charity, Human Security, and Government Legitimacy in Pakistan* (pp. 1–18). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781009268455.003>

Cherla, A. ... Mossialos, E. (2021). The 'Netflix plus model': can subscription financing improve access to medicines in low- and middle-income countries? *Health Economics, Policy and Law*, 16(2), 113–123. <https://doi.org/DOI:10.1017/S1744133120000031>

Fabe, A. P. ... Laksmi, S. (2022). The Growth of Financial Technology in Indonesia: Implications for Terrorism Financing. *International Annals of Criminology*, 60(2), 162–181. <https://doi.org/DOI:10.1017/cri.2022.16>

Fitriyanti, F. ... Nurhaifa, R. F. (2023). Application of Sharia Principles in Sharia Financial Institutions. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 157–166.

Ghozali, M. (2019). LEGAL ANALYSIS ON THE FATWA OF SHARIA NATIONAL COUNCIL ON RAHN: Between Legal Philosophy and Its Implementation in Indonesia Sharia Pawnshop Implementation in Indonesia Sharia Pawnshop. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 76–115.

Harahap, R. A. ... Muda, I. (2021). Sharia Pawnshop: The Pawnshops Issue Sharia Based Products. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(9).

HS, W. H., & Soemitra, A. (2022). Fiqh Muamalah Sharia Pawnshop. *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET)*, 1(3), 250–261.

Ihyak, M. ... Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review).

Enrichment: Journal of Management, 13(2), 1560–1567.

Imaniyati, N. S. ... Jamilah, L. (2019). Analysis of the role and responsibility of Sharia supervisory board (DPS) on Sharia compliance supervision in Islamic banks in Indonesia. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 22, 1.

Jia, X. ... Lobo, G. J. (2024). Financial Literacy and IPO Underpricing. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 59(3), 1430–1469. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0022109023000315>

Johnson, J. ... Sharfstein, J. M. (2022). INTRODUCTION Disrupting the Status Quo: Building Equitable Access to HIV PrEP in the US through Innovative Financing. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 50(S1), 5–7. <https://doi.org/DOI: 10.1017/jme.2022.29>

Judijanto, L. ... Lucky, M. (2024). Identification of Research Trends in Islamic Financial Product Innovation. *West Science Interdisciplinary Studies*, 2(02), 467–474.

Lin, Y.-H. ... Huang, H.-W. (2018). Internal control material weaknesses and foreign corrupt practices act violations. *Journal of Forensic Accounting Research*, 3(1), A80–A104.

Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program*, 1(2), 49–58.

Lusardi, A., & Messy, F.-A. (2023). The importance of financial literacy and its impact on financial wellbeing. *Journal of Financial Literacy and Wellbeing*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/DOI: 10.1017/flw.2023.8>

Nasrullah, M. (2024). Implementation of Fiqh Rules in Economic Transactions in Islamic Financial Institutions: A Literature Review Study. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(3), 347–360.

Permana, I. (2021). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Bumi Aksara.

Prabhakar, R. (Ed.). (2021). Financial inclusion and saving. In *Financial Inclusion: Critique and Alternatives* (pp. 45–70). Bristol University Press. <https://doi.org/DOI: 10.46692/9781447355946.004>

Qolbi, F. A. ... Nugroho, M. S. F. (2024). Development and Application of Akad Rahn in Nash Perspective. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(01), 47–54.

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Ridwan, R., & Mayapada, A. G. (2022). Does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in Indonesia Islamic banks? *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(2), 299–318. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819>

Sandberg, R., & Cranmer, F. (2019). The Council of Europe and Sharia: An Unsatisfactory Resolution? *Ecclesiastical Law Journal*, 21(2), 203–212. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0956618X19000073>

Sumpf, A. (Ed.). (2022). Discriminatory Social Welfare. In *The Broken Years: Russia's Disabled War Veterans, 1904–1921* (pp. 136–193). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781009047296.005>

Talib, A. ... Al-Amin, A.-A. (2024). Challenges and Opportunities in Implementing Sharia Principles in Business Management. *International Journal of Sharia Business Management*, 3(1), 1–8.

Wijaya, N. H. (2022). the Challenges of Sharia Pawnshops in Indonesia in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *El-Mashlahah*, 12(1), 52–69.
Walliman, N. (2021). *Research methods: The basics*. Routledge.

Wijaya, N. H. (2022). the Challenges of Sharia Pawnshops in Indonesia in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *El-Mashlahah*, 12(1), 52–69.

UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Mwa Afriza Adia Y.
NIM/NIMKO : 21211060
PRODI : Ekonomi Syari'ah (ESY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
	30 / 24	Layout		
	01 / 24	lay out		
	30 / 24	Pendahuluan Khusus Ke umum		
	22 / 24	pendahuluan Khusus ke umum.		
	12 / 24	Penelitian data, Data diolah		
	14 / 24	Metode penelitian		
	17 / 24	Metode penelitian		
	21 / 24	Teori Manajemen Strategi, Strategi		
	23 / 24	Pemasaran, Pemasaran syari'ah		
	27 / 24	Pembahasan		
	15 / 25	Hasil dan Pembahasan		
	20 / 25	Daftar pustaka.		
	24 / 25	Acc Abstrak		
	23 / 25	Penyesuaian Daftar Pustaka		
	25 / 25	Penyesuaian Template Jurnal		
	27 / 25	Acc		

Mulai Bimbingan : 05. 12. 2024.

Batas Akhir Bimbingan : 09. 05. 2025

Blokagung, 20 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Prodi

Munawir, M.Ag

Dosen Pembimbing

(Mam Muth.)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

PENGESAHAN REVISI UJIAN ARTIKEL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

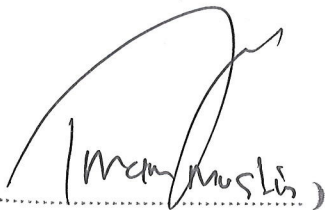
Nama : NILVA ALFRIZA AULIA YUSNITHA
NIM : 2113111060
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)
Judul : ANALYSIS OF THE FATWA OF THE
NATIONAL SHARIA COUNCIL OF THE INDONESIAN
ULEMA COUNCIL ON THE RAHN CONTRACT AT
PT PEGADAIAN SYARIAH SIMPANG LIMA
BANYUWANGI

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Artikel pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025.

Blokagung, 16 Juli 2025

Pembimbing

Mengetahui,
Dekan



Dr. Hj. Lely Ann Erawati E, SE., MH., MM., CRP.
NIP. 3150425027901

Lembar pengesahan revisi ujian skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat pengumpulan hasil berkas skripsi (data pendukung skripsi)

SERTIFIKAT

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor: 177/E/KPT/2024 Tanggal: 15 October 2024

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024

Nama Jurnal Ilmiah

urisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam

E-ISSN

2477281X

IAIN Langsa

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah:

TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu:
Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 sampai Volume 19 Nomor 2 Tahun 2027

Jakarta,

Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat



M. Faiz Syuaib

NIP. 196708311994021001

TERAKREDITASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Niswa Alfriza Aulia Yusnitha
 NIM : 2113111060
 TTL : Banyuwangi, 20 September 2003
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Alamat : Jl. Raya Kuta, Badung, Denpasar, Bali

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah /Perguruan Tinggi	Bidang Studi
TK	2008	2009	TK Aysyah	
SD	2009	2015	MI Al-azhar	
MTS	2015	2018	MTS Darussalam	
MA	2018	2021	MA Al-Amiriyyah	IPA
S1	2021	2025	Universitas Kh. Mukhtar Syafaat	Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan NonFormal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Lembaga Pendidikan
Ula	2018	2020	Pp. Darussalam Blokagung
Wustho	2020	2022	Pp. Darussalam Blokagung
Ulya	2022	2024	Pp. Darussalam Blokagung
Mutakhorijat	2024	2025	Pp. Darussalam Blokagung

Blokagung, 31 Juli 2025

Niswa Alfriza Aulia Yusnitha
 Nim: 2113111060